

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR SINGKATAN .....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Konseptual .....	12
E. Metode Penelitian .....	17
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II : KERANGKA TEORETIS	
A. Kewenangan .....	22
B. Pengawasan .....	26
C. Independensi.....	31
D. Tindak Pidana Korupsi .....	33
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN	
A. Uraian Kasus.....	39
B. Reaksi dari Pembentukan Dewan Pengawas Dalam Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	40

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

- A. Problematika Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Adanya Dewan Pengawas Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi .... 54
- B. Upaya Pemerintah Mengatasi Problematika Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Adanya Dewan Pengawas ..... 70

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 72
- B. Saran ..... 73

DAFTAR PUSTAKA ..... 75

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

## DAFTAR SINGKATAN

KPK	adalah Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
BPK	adalah Badan Pemeriksa Keuangan
DPR	adalah Dewan Perwakilan Rakyat
UNCAC	adalah <i>United Nations Convention Against Corruption</i>
MK	adalah Mahkamah Konstitusi
KEMINFO	adalah Kementerian Informasi
RUU	adalah Rancangan Undang Undang
PERPPU	adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
ICW	adalah <i>Indonesia Corruption Watch</i>
UU	adalah Undang-Undang
UUD	adalah Undang-Undang Dasar dan seterusnya.